

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pembangunan ekonomi daerah merupakan suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakat bersama-sama mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru yang merangsang perkembangan kegiatan ekonomi dalam wilayah tersebut.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, menegaskan bahwa program penataan pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan secara profesional, efisien, transparan, dan bertanggung jawab. Sasaran yang ingin dicapai adalah semakin meningkatnya proporsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara signifikan dalam pembiayaan bagi kegiatan pelayanan masyarakat dan pembangunan. Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disebut dengan UU PEMDA dalam Pasal 157 menyebutkan sumber pendapatan tetap yang digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan Daerah Otonom terdiri dari:

1. Pendapatan Asli Daerah
2. Dana Perimbangan
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah

Sumber Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber keuangan daerah yang digali dari dalam wilayah daerah yang bersangkutan. Proporsi Pendapatan Asli Daerah dalam seluruh penerimaan daerah masih rendah bila dibandingkan dengan penerimaan dari bantuan pemerintah pusat. Keadaan ini menyebabkan

perlu dilakukan suatu upaya untuk menggali potensi keuangan daerah dalam peningkatan pendapatan daerah. Pentingnya Pendapatan Asli Daerah dalam menunjang pendapatan tetap yang digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan Pemerintah Kabupaten Kudus sangat disadari oleh Pemerintah Daerah. Demikian pula alternatif-alternatif untuk memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah telah pula dipertimbangkan oleh Pemerintah Kabupaten. Berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Pendapatan Asli Daerah terdiri dari:

1. Pajak Daerah
2. Retribusi Daerah
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, yang bersumber dari:
 - a. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah (BUMD).
 - b. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara (BUMN).
 - c. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta.

Salah satu komponen Pendapatan Asli Daerah yang mempunyai kontribusi dan potensi terbesar di Kabupaten Kudus adalah pajak daerah. Pajak Daerah merupakan sumber pendapatan yang dapat dikembangkan berdasarkan peraturan-peraturan pajak yang diterapkan oleh daerah untuk kepentingan pembiayaan rumah tangga pemerintah daerah tersebut.

Secara umum pajak adalah pungutan dari masyarakat oleh Negara (Pemerintah) berdasarkan Undang-Undang yang bersifat dapat dipaksakan dan terutang oleh yang wajib membayarnya dengan tidak mendapat prestasi kembali (kontraprestasi/balas jasa) secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran.¹

¹ Mardiasmo, "Perpajakan", ANDI, Yogyakarta, 2003, hal. 20.

Untuk memaksimalkan upaya kabupaten dalam meningkatkan sumber pendapatan daerahnya melalui penggalan terhadap sektor-sektor yang cukup potensial, pemerintah telah menetapkan *political will*. Manifestasi dari *political will* yang ditetapkan pemerintah pusat tersebut ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atau selanjutnya disebut sebagai UU PDRD. Dasar pertimbangan dengan ditetapkannya UU tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ini adalah untuk memperkuat upaya peningkatan penerimaan daerah yang nyata dan bertanggung jawab dengan menitikberatkan pada kabupaten.

UU tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ini secara tegas menetapkan jenis-jenis pajak dan retribusi yang dapat dipungut daerah dalam rangka penyederhanaan jenis-jenis pajak dan retribusi yang telah ada. Selain bertujuan untuk menyederhanakan terhadap pajak dan retribusi daerah, Undang-Undang ini juga bertujuan untuk memperbaiki sistem administrasi perpajakan daerah dan

Sejalan dengan diberlakukannya UU tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di kabupaten maka konsekuensi secara langsung yang diterima oleh kabupaten dari pusat adalah adanya kewenangan penuh untuk mengelola sejumlah pajak dan retribusi. Untuk melaksanakan kewenangan dari pusat tersebut maka pemerintah daerah harus mempunyai peraturan daerah yang dapat mengatur mengenai pengelolaan dan pemanfaatan pajak dan retribusi untuk meningkatkan penerimaan pendapatan daerah.

Beberapa macam pajak yang dipungut oleh pemerintah Kabupaten Kudus diantaranya yaitu pajak reklame, pajak restoran dan pajak hotel, pajak hiburan, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan bahan galian, dan pajak parkir.

Dasar pertimbangan yang melatarbelakangi penulis mengambil judul ini adalah bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pajak Reklame. Dengan dasar ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Kudus tentang Pajak Reklame memiliki peranan yang sangat penting untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Bagi pemerintah Kabupaten/Kota penerimaan yang bersumber dari pajak merupakan sumber yang sangat diandalkan. Pada dasarnya penerimaan pajak mempunyai ketertarikan yang erat dengan jasa pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat sehingga pertumbuhan penduduk dan peningkatan perekonomian ikut mendorong penerimaan pajak daerah.

Salah satu penerimaan daerah adalah pajak reklame yang merupakan bagian dari pajak daerah. Pajak reklame adalah pungutan yang dikenakan terhadap penyelenggaraan reklame. Pajak reklame dikenakan dengan alasan bahwa reklame dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca, dan didengarkan dari suatu tempat umum, kecuali yang dilakukan oleh pemerintah. Pajak reklame merupakan pajak daerah yang merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah yang diatur berdasarkan peraturan daerah masing-masing dan hasil pungutannya digunakan untuk pembiayaan rumah tangga daerah.

Pemberian beban bagi wajib pajak reklame memang bukan semata-mata karena meningkatkan kebutuhan dana untuk pembangunan saja, tetapi juga disebabkan sifat pajak reklame sebagai pajak objektif yang dasar pengenaannya adalah nilai sewa reklame (NSR). NSR yang diperhatikan dengan memperhatikan lokasi penempatan, jenis reklame, jangka waktu penyelenggaraan, dan ukuran media reklame.

Dipilihnya Pajak Reklame sebagai objek penelitian karena sebagai salah satu jenis pajak daerah yang dikembangkan Pemerintah Kabupaten Kudus, Pajak Reklame sebagai kontributor dalam penerimaan Pendapatan Asli Daerah meskipun realisasinya tidak sebesar dibandingkan dengan jenis pajak daerah lain seperti pajak kendaraan bermotor, pajak penerangan jalan, dan lain-lain. Atas dasar itulah maka Pajak Reklame dapat digunakan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Pajak reklame sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah sangat potensial, hal ini bisa dilihat dalam daftar penerimaan pajak reklame dalam tiap tahun.

Tabel 1.1
Penerimaan Pajak Reklame
Kabupaten Kudus Tahun 2008-2012
(Rupiah)

No.	Tahun	Penerimaan
1	2008	1.266.233.675
2	2009	1.860.384.250
3	2010	1.109.260.210
4	2011	1.797.458.050
5	2012	699.083.550

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kudus 2008-2012

Pajak reklame elastis terhadap laju inflasi, sedangkan kontribusi pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah walaupun masih kecil akan tetapi cukup berarti dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintah. Upaya pemerintah dalam meningkatkan penerimaan pajak reklame sudah cukup baik dan selalu berkembang demi kemajuan bersama, hal ini bisa dilihat dari peran pemerintah yang selalu berusaha meningkatkan penerimaannya dengan cara mengevaluasi, mengkaji kembali dan apabila diperlukan menaikkan pengenaan tarif yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dan faktor-faktor yang menjadi pendukung antara lain informasi dan data objek pajak reklame, media komunikasi sudah cukup dimanfaatkan sebaik mungkin.

B. PERMASALAHAN

1. Bagaimanakah pelaksanaan pemungutan Pajak Reklame di Kabupaten Kudus ?
2. Apa yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pajak Reklame dan bagaimana cara mengatasinya?
3. Bagaimana kontribusi Pajak Reklame terhadap PAD?

C. TUJUAN PENELITIAN

Dalam penelitian ini tujuan yang diharapkan untuk dapat dicapai adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pemungutan Pajak reklame di Kabupaten Kudus dan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah.

2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam pelaksanaan PERDA Kabupaten Kudus tentang Pajak Reklame dan cara mengatasinya.
3. Untuk mengetahui besaran kontribusi Pajak Reklame terhadap PAD.

D. KEGUNAAN PENELITIAN

Penelitian mengenai “PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN KUDUS”, diharapkan memberi manfaat atau kegunaan baik secara teoritis maupun praktis.

1. Kegunaan Teoritis.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ke arah pengembangan atau kemajuan di bidang ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara pada khususnya.

2. Kegunaan Praktis.

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran, kepada pihak-pihak yaitu:

- a. Bagi Pegawai Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD), dapat bermanfaat dalam mengoptimalkan pengawasan internal untuk peningkatan PAD.
- b. Bagi Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), dapat bermanfaat memberikan rekomendasi terhadap pemasangan Reklame sesuai dengan tempat yang ditentukan dan memberikan pengawasan untuk penertiban reklame.

- c. Bagi Para Pegawai yang berkaitan dengan Pajak Reklame, dapat bermanfaat untuk lebih mengoptimalkan potensi Pajak Reklame terhadap Pendapatan daerah.
- d. Bagi Masyarakat pembayar Pajak Reklame, untuk lebih taat dalam mendaftarkan dan membayar Pajak Reklame.

E. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I merupakan pendahuluan yang mengemukakan Latar Belakang, Permasalahan, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II mengemukakan mengenai Tinjauan Pustaka yang berguna untuk membahas permasalahan yang dirumuskan. Berisi atau menjelaskan tentang Tinjauan umum tentang pajak, Pendapatan daerah, Pajak reklame.

BAB III menjelaskan tentang Metode Penelitian yang terdiri dari Metode Pendekatan, Spesifikasi Penelitian, Metode Penentuan Sampel, Metode Pengumpulan Data, Metode Pengolahan dan Penyajian Data, serta Metode Analisis Data.

BAB IV memuat tentang hasil Penelitian dan Pembahasan yang merupakan inti Skripsi, yang terdiri atas Pelaksanaan pemungutan pajak reklame, kontribusi pajak reklame terhadap PAD, dan hambatan dalam pelaksanaan PERDA tentang pajak reklame berikut cara mengatasinya.

BAB V merupakan bab Penutup yang terdiri dari Kesimpulan dan Saran dari penulis terkait dengan hasil penelitian.